

**REMOTE SEXUAL ASSAULT DI THAILAND:
ANALISIS BERDASARKAN RESPON UNICEF**

Nurbani Adine Gustianti, Rianne Octa Syahrani, & Gregory Henry Erari
Universitas Singaperbangsa Karawang

**Email: nurbani.adine@fisip.unsika.ac.id, riannecto04@gmail.com,
2110631260024@student.unsika.ac.id**

ABSTRAK

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai negara. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Thailand merupakan salah satu negara dengan jumlah kasus pariwisata seks anak terbesar di dunia. Prostitusi di Thailand bermain peran dalam perekonomian negara. Ironisnya sebagian besar pendapatan nasional Thailand berasal dari sektor pariwisata seks. Persoalan Human Security di Thailand telah menyebabkan turunnya citra negara Thailand akibat banyaknya perspektif dan respon yang buruk mengenai isu kekerasan seksual ini. Tujuan dari penulisan jurnal ini yaitu, mengetahui respon dari UNICEF serta upaya yang dilakukannya melalui berbagai program pengendalian remote sexual assault, supaya permasalahan kekerasan seksual terhadap anak-anak dan perempuan di Thailand ini segera terselesaikan, dan juga memberikan pemahaman kepada masyarakat internasional mengenai pentingnya human security supaya kekerasan seksual ini tidak terjadi lagi di negara manapun. Peneliti menggunakan metode deskriptif-analisis yang dimana mengumpulkan berbagai studi kepustakaan, menyusun, menginterpretasikan data, yang kemudian dianalisis untuk mendapatkan data yang valid. Dengan menggunakan pendekatan Human Security dan Organisasi Internasional untuk menganalisis respon dari United Nations Children's Fund (UNICEF) yang berada dibawah naungan PBB yang mementingkan berbagai isu terkait hak anak-anak sangat diperlukan dalam membantu pemerintahan Thailand dalam menangani kasus kekerasan anak yang terjadi di Thailand. Kemudian hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan respon dari UNICEF dan melalui beberapa program pengendalian Remote Sexual Assault belum sepenuhnya dapat meminimalisir kekerasan seksual terhadap anak-anak di Thailand.

Kata kunci: UNICEF, Thailand, Kekerasan Seksual, Human Security

ABSTRACT

The phenomenon of sexual violence against children is increasingly common and has become global in almost various countries. Cases of sexual violence against children continue to increase from time to time. This increase is not only in terms of quantity or the number of cases that occur, but also in terms of quality. Thailand is one of the countries with the largest number of cases of child sex tourism in the world. Prostitution in Thailand plays a role in the country's economy. Ironically, most of Thailand's national income comes from the sex tourism sector. Human Security issues in Thailand have caused Thailand's image to deteriorate due to the many perspectives and poor responses to this issue of sexual violence. The purpose of writing this journal is to find out the response from UNICEF and the efforts it has made through various remote sexual assault control programs, so that the problem of sexual violence against children and women in Thailand is immediately revealed, and also provide an understanding to the international community about the importance of security. People so that this sexual violence does not happen again in any country. The researcher uses a descriptive-analytic method which collects various literature studies, compiles and interprets the data, which is then analyzed to obtain valid data. By using the approach of Human Security and International Organizations to analyze the response from the United Nations Children's Fund (UNICEF) which is under the auspices of the United Nations which includes various issues related to children's rights, it is very necessary to assist the Thai government in dealing with cases of child violence that occurred in Thailand. Then the results of the study show that based on the response from UNICEF and through several Remote Sexual Assault control programs, it has not been fully able to minimize sexual violence against children in Thailand.

Keywords: UNICEF, Thailand, Sexual Assault, Human Security.

PENDAHULUAN

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai negara. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Dan yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak.

Kekerasan seksual adalah segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak lainnya. Kekerasan seksual meliputi penggunaan atau pelibatan anak secara komersial dalam kegiatan seksual, bujukan ajakan atau paksaan terhadap anak untuk terlibat dalam kegiatan seksual, pelibatan anak dalam media audio visual dan pelacuran anak (UNICEF, 2014). Kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya, tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang (WHO, 2017).

Thailand merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang menjadi negara tidak aman untuk *traveler* terutama wanita, banyaknya kejahatan seksual yang terjadi di Thailand membuat para wisatawan perlu menjaga diri dari kejahatan seksual. Terdapat istilah *sex tourism* di Thailand yang sudah muncul sejak masa pemerintahan Ayuthya (1350-1767) yang ditandai oleh dilegalkannya prostitusi di Thailand (Pssat, 2017). Istilah *sex tourism* ini lebih mengarah kepada perempuan dan anak-anak sebagai korban. Sepanjang sejarah, terdapat korelasi erat antara pembangunan migrasi, ekonomi, dan prostitusi di Thailand ketika bersaing di pasar global. Bahkan prostitusi merupakan usaha bisnis yang menguntungkan tidak hanya untuk negara Thailand, melainkan untuk para turis yang datang. Terdapat industri seks di Thailand sebagai penyumbang devisa negara terbesar, karena dalam sektor kebijakan pemerintah berfokus pada pengembangan ekonomi pariwisata (Mubaroq, 2016).

Thailand juga berupaya menekan angka kekerasan seksual terhadap anak-anak dengan bekerjasama bersama Organisasi Internasional seperti UNICEF melalui promosi media elektronik dan media cetak. Upaya UNICEF dengan membuat iklan layanan masyarakat melalui kerjasama dengan MTV (*Music Television*) (Mubaroq, 2016). Apabila dikaitkan dengan pendekatan teori konstruktivisme maka apa yang dijalankan oleh Thailand

merupakan bagian dari memperkuat legitimasi. Masalah *Human Security* terhadap kekerasan seksual kepada anak-anak dan perempuan di Thailand sudah menarik berbagai entitas sosial yang sebagian besar diantaranya telah terbentuk sebuah hubungan emosional dan ikatan-ikatan ekonomi yang saling membutuhkan. Thailand juga bekerjasama dengan ASEAN dan negara GMS. ASEAN dan para negara anggotanya telah membuktikan komitmennya dalam meningkatkan kesadaran negara individu dan kolektif untuk mengatasi kejahatan lintas negara termasuk kekerasan seksual di setiap negara.

Salah satunya referensi yang digunakan penulis sebagai bahan acuan dalam memperdalam penelitian yakni menggunakan jurnal yang berjudul "Kerja Sama *United Nation Children's Fund* (UNICEF) dan Pemerintah Thailand dalam Menangani Kasus Prostitusi Anak di Thailand" oleh Riani Septi Hertini, Anastazia N Wattimena, dan Nur Azizah, yang dipublikasikan melalui journal.umy.ac.id. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa, Thailand merupakan salah satu negara yang dikenal dengan sebutan *Child Sex Tourism* karena tingginya angka eksploitasi seks terhadap anak sebagai pekerja prostitusi. Prostitusi anak di Thailand memiliki peran penting bagi perekonomian negara. Sektor pariwisata seks di Thailand telah menyumbang sekitar 60% bagi pendapatan nasional dalam sektor pariwisata Thailand. Setiap tahunnya ada sekitar 10 juta turis asing datang ke Thailand dan sekitar 60% turis tersebut adalah laki-laki. Dari 60% tersebut, ada sekitar lebih dari 4 juta laki-laki datang ke Thailand dengan tujuan untuk pariwisata seks (Grugic dan Philip, 2014).

Maka dari itu, untuk mengatasi masalah tersebut, diantaranya Pemerintah Thailand bekerja sama dengan salah satu organisasi internasional di bawah naungan PBB yaitu UNICEF (*United Nation Children's Fund*) untuk menangani prostitusi anak yang terjadi di Thailand. UNICEF memberikan kontribusi dalam hal bantuan kemanusiaan dan kesejahteraan untuk anak-anak dan para ibu di negara berkembang. Kemudian terdapat beberapa program UNICEF di Thailand yaitu *Child Protection, Education, HIV/AIDS, Social Policy and Advocacy, Emergencies* (Hertini, et al., 2018). Penulis menggunakan beberapa pendekatan yaitu teori konstruktivisme dan human security.

Oleh karena itu, maka penulis tertarik membahas "Bagaimana respon dari *United Nation Children's Fund* (UNICEF) terhadap kasus kekerasan seksual anak di Thailand?" Adapun tujuan dari penulisan jurnal ini yaitu, mengetahui respon dari UNICEF serta upaya yang dilakukannya melalui berbagai program pengendalian *remote sexual assault*, supaya

permasalahan kekerasan seksual terhadap anak-anak dan perempuan di Thailand ini segera terselesaikan, dan juga memberikan pemahaman kepada masyarakat internasional mengenai pentingnya *human security* supaya kekerasan seksual ini tidak terjadi lagi di negara manapun. Kemudian, mengenai program perencanaan penanganan pemerintah Thailand untuk bersama-sama memberantas kasus kekerasan seksual dapat menjadi ilmu yang mudah dipelajari, dipahami, juga diterapkan oleh seluruh masyarakat internasional di kehidupan sehari-harinya.

Maka demikian, penulis tertarik untuk mengkaji serta menganalisis isu ini lebih dalam lagi mengenai respon UNICEF terhadap *remote sexual assault* di Thailand. Kemudian penulis mengambil serta menggunakan banyak referensi dalam mengkaji dan menulis jurnal ini. Fenomena terkait kekerasan seksual ini penting untuk ditulis karena merupakan peringatan untuk semua orang dan juga pembaca agar lebih mengetahui bagaimana fenomena kekerasan seksual di Thailand ini sudah berlangsung lamanya dan separah apa dampaknya terhadap korban, para pembaca juga agar bisa berhati-hati lagi akan kekerasan seksual.

KERANGKA ANALISIS

Teori Konstruktivisme

Teori konstruktivisme yang dimana melihat sistem internasional tidak anarki seperti yang diyakini oleh pendekatan realis. Dalam pandangan konstruktivis, sistem yang anarki adalah ciptaan negara itu sendiri. Menurut pandangan konstruktivis tidak benar bahwa sistem internasional alami bersifat anarki karena anarki sendiri tercipta oleh negara. Tindakan yang diambil oleh negara akan tergantung pada identitas yang ingin diperlihatkan oleh negara tersebut (Cynthia Weber, 2001). Konstruktivisme mengatakan dan benar meyakini bahwasannya peran individu telah tersusun seperti halnya pendapat dari rasionalis. Seringkali perspektif konstruktivisme dipandang sebagai "teori jalan tengah" di dalam ilmu hubungan internasional. Konstruktivisme memandang dunia sosial sekarang ini, merupakan wilayah "antar subjektif" yang membuat masyarakat yang hidup dan menetap di dalamnya merasa sangat berarti (Utami, 2020). Jill Steans Llyod Pettiford (2009) berpendapat bahwasanya perspektif konstruktivisme memiliki beberapa asumsi dasar. Perspektif ini lebih meruncing pada sebuah persoalan terjadinya fenomena sosial. Konstruktivisme sosial lebih mengedepankan fungsi ataupun peran dari institusi, hal ini disebabkan institusi membentuk identitas serta norma-norma yang ada.

Teori Human Security

Kemudian teori *human security* adalah salah satu bentuk *critical theory* yang terlahir karena keamanan individu sama pentingnya dengan keamanan negara dan tidak dapat dijelaskan dengan teori realisme yang hanya berpusat kepada negara sebagai objek penelitian satu-satunya. "*Human Security*" atau keamanan manusia, *Human Security* muncul karena maraknya permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan manusia seperti terorisme, perdagangan manusia, perdagangan senjata ilegal, konflik antar penduduk, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) lain sebagainya. Hal-hal tersebut juga menyadarkan manusia bahwa keamanan pribadi merupakan suatu hal yang melekat di dalam diri manusia dan merupakan hak pribadi. Menurut *United Nation* menyebutkan beberapa jenis dari *Personal Security* yaitu *Sexual Violence, Sexual Assault, Hostage Taking, Crowds, Protests and Demonstrations, Landmines, Weapons Firing, Hijacking, Arrest and detention.x* (Peggy, 2020).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan metode deskriptif analisis atau *descriptive research* yang dimana mengumpulkan berbagai studi kepustakaan, menyusun, menginterpretasikan data, yang kemudian dianalisis untuk mendapatkan data yang valid. Dan teknik pengumpulannya menggunakan studi kepustakaan, yaitu menggunakan data dari jurnal ilmiah, artikel, buku, media massa, dokumen, dan laporan pemerintah maupun non-pemerintah. Kemudian berusaha memaparkan secara jelas berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan yang dituangkan melalui kata-kata yang dapat memperjelas serta menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian.

PEMBAHASAN

Awal mula *sexual assault* terjadi di Thailand

Pada awal dibukanya pariwisata Thailand, wisatawan dari Amerika, Australia, dan Eropa menjadi sumber utama permintaan terhadap anak sebagai komoditas seks di Thailand. Tetapi seiring perkembangan ekonomi di Asia, di tahun 2000-an, terdapat wisatawan regional baik di Tiongkok, Jepang, dan Korea turut serta menjadi sumber dari permintaan terhadap anak sebagai komoditas seks (Lestari; Anom Wiranata; Kawitri Resen; 2014: 3).

Didorong oleh keadaan, struktur sosial dan para pelaku individu ke dalam situasi-situasi dimana orang dewasa memanfaatkan kerentanan mereka hingga mengeksploitasi dan

melakukan kekerasan seksual kepada anak-anak. Namun terdapat beberapa anak-anak yang memang rentan terhadap kekerasan seksual, seperti:

1. Anak yang tidak memiliki pengasuhan dari orang tua, tinggal sendiri, tinggal dengan keluarga angkat, tinggal dalam institusi yang menghadapi bahaya besar karena tidak adanya dukungan dari perlindungan dari orang tua serta masyarakat.
2. Anak yang cacat fisik, cacat mental, dan yang mempunyai kebutuhan khusus. Karena pada umumnya mereka tidak memiliki kemampuan untuk menghindar dari kekerasan seksual yang dialami, dan untuk memahami apa yang terjadi kepada mereka serta mereka akan sulit dalam menjelaskan kekerasan seksual tersebut.
3. Anak-anak dari kelompok yang termarginalkan seperti anak-anak dari etnis, suku, dan komunitas agama minoritas. Mereka akan mengalami dampak ekonomi yang merugikan karena terdapat diskriminasi yang membuat mereka sangat rentan terhadap kekerasan seksual terhadap anak-anak akibat posisi mereka yang lemah dan kurang mendapatkan perhatian serta perlindungan dari keluarga dan kerangka hukum & kebijakan yang lemah (ECPAT International, 2006).

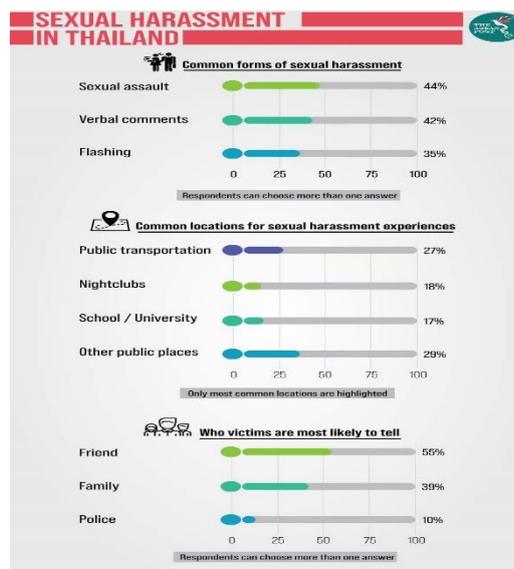
Pariwisata seks anak merupakan eksploitasi seksual atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan perjalanan dari dalam negara Thailand atau bahkan dari lintas negara untuk melakukan hubungan seks dengan anak-anak. Beberapa negara memandang eksploitasi seksual anak sebagai komponen utama dalam program pembangunan pariwisatanya. Namun kini setelah pemerintah Thailand menyadari betapa seriusnya masalah kekerasan seksual terhadap anak-anak yang terjadi hingga dampaknya berlangsung lama, akhirnya mengambil langkah tegas menolak eksploitasi anak dalam bidang pariwisata (ECPAT International, 2005: 11). Thailand melakukan ratifikasi terhadap tiga konvensi PBB yaitu konvensi ILO atau *Worst Form of Child Labour Convention* nomor 182 tentang pekerja anak, *Convention on the Rights of the Child (CRC)*, *Optional Protocol on Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography* demi mengurangi masalah kekerasan seksual terhadap anak.

Di era globalisasi yang semakin pesat ini, konsumerisme dan gaya hidup tinggi sudah menyeluruh ke pedesaan, akibatnya terjadi kurangnya lapangan pekerjaan di Thailand bagi masyarakat pedesaan yang masih banyak tidak berpendidikan, serta kurangnya pengalaman membuat para petani dilanda kemiskinan dan dengan terpaksa harus melibatkan anak-anak perempuan ke dalam sebuah prostitusi. Maka jika ada seorang anak yang berasal dari

keluarga tidak mampu akan merantau keluar kota menjadi pekerja seks, hal tersebut pun menjadi lumrah dan dimaklumi oleh masyarakat sekitar.

Berdasarkan survei yang diambil dari website *THE ASEAN POST*, survei menemukan bahwa sebagian besar pengalaman pelecehan seksual tampaknya terjadi di tempat umum, seperti angkutan umum (27 persen), klub malam (18 persen), sekolah/universitas (17 persen), dan tempat umum lainnya (29 persen). Mungkin salah satu temuan yang paling disayangkan dari survei adalah bahwa sementara satu dari lima orang Thailand pernah mengalami pelecehan seksual, lebih dari setengah responden (57 persen) mengatakan kepada seseorang tentang mereka dilecehkan secara seksual. Dari persentase ini, menurut survei, orang lebih cenderung memberi tahu teman (55 persen) atau anggota keluarga (39 persen) daripada polisi (10 persen). Pria (60 persen) ditemukan lebih mungkin untuk melaporkan pengalaman pelecehan seksual mereka daripada wanita (55 persen).

Gambar 1. Data Sexual Harassment di Thailand



Sumber: <https://theaseanpost.com/article/thais-have-sexual-harassment-problem>

Dalam survei terhadap 1.107 orang Thailand oleh YouGov, lembaga riset pasar yang berbasis di Inggris Raya (UK) menemukan bahwa 21 persen responden yang mereka wawancarai mengatakan pernah mengalami pelecehan seksual. Pelecehan seksual merupakan bentuk pelecehan seksual yang paling banyak dilaporkan oleh responden (44 persen). Bentuk pelecehan seksual paling umum kedua adalah komentar verbal yang bersifat seksual (42 persen) dan flashing (35 persen). YouGov mengatakan definisi setiap bentuk pelecehan seksual dibiarkan terbuka dan diserahkan kepada responden. Survei menemukan

bahwa sebagian besar pengalaman pelecehan seksual tampaknya terjadi di tempat umum, seperti angkutan umum (27 persen), klub malam (18 persen), sekolah/universitas (17 persen), dan tempat umum lainnya (29 persen).

Mungkin salah satu temuan yang paling disayangkan dari survei tersebut adalah bahwa sementara satu dari lima orang Thailand pernah mengalami pelecehan seksual, lebih dari separuh responden (57 persen) memberi tahu seseorang tentang pelecehan seksual yang mereka alami. Dari persentase tersebut, menurut survei, orang lebih cenderung memberi tahu teman (55 persen) atau anggota keluarga (39 persen) daripada polisi (10 persen). Laki-laki (60 persen) ditemukan lebih mungkin melaporkan pengalaman pelecehan seksual mereka daripada perempuan (55 persen). Menurut survei, alasan utama orang memilih untuk tidak melaporkan pelecehan seksual adalah rasa malu (46 persen), diikuti oleh rasa takut tidak ada yang akan melakukan apa pun untuk mengatasi masalah tersebut (27 persen). Ketakutan akan dampak dan tekanan budaya juga mendapat skor tinggi (keduanya 25 persen) dalam survei.

Kekerasan seksual pada anak di Thailand masih marak terjadi dan belum terselesaikan di Thailand. Masalah ini mendapatkan respon dari masyarakat internasional, karena kekerasan seksual terhadap anak merupakan sebuah pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dapat menyebabkan kerusakan fisik maupun mental. Hal ini merupakan masalah yang besar, karena melibatkan banyak aktor seperti, masyarakat dan pemerintah Thailand hingga Organisasi Internasional untuk menanganinya.

Respon UNICEF terhadap *sexual assault* di Thailand

UNICEF sebagai salah satu lembaga di bawah naungan PBB, berperan untuk membantu serta mengawasi aktivitas Negara anggota dalam menyelesaikan permasalahan domestik yang memiliki dampak global terhadap dunia internasional dengan cara bekerjasama. Sudah menjadi norma internasional bahwa setiap negara wajib untuk melindungi hak-hak anak terlepas dari apa kewarganegaraan anak-anak tersebut. Oleh karena itu, UNICEF sebagai *Inter-Governmental Organization* bertanggung jawab untuk berkontribusi dan bekerja sama dengan pemerintah Thailand dalam menangani kasus *sexual assault* di Thailand.

UNICEF Thailand bekerja untuk memastikan hak semua anak di Thailand, terlepas dari kewarganegaraan, jenis kelamin, agama atau etnis mereka untuk bertahan, berkembang, perlindungan dan juga partisipasi. Hak-hak dasar ini kemudian diabadikan dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi Thailand pada tahun

1992, dan pada artikel 34 konvensi tersebut menyatakan bahwa pemerintah harus melindungi anak-anak dari segala bentuk pelecehan seksual dan eksploitasi. Untuk memastikan bahwa hal tersebut terpenuhi, UNICEF bekerja sama dengan pemerintahan Thailand dalam memenuhi pendanaan program untuk melindungi anak-anak dari bahaya dan mendukung pemimpin politik untuk kebijakan dan praktik yang menghormati hak anak-anak (UNICEF, 2018; *UNICEF Thailand*).

UNICEF sebagai institusi Internasional yang berfokus pada perlindungan anak, kerap menerapkan respon menurut pandangan dari Teori Konstruktivisme. Dimana, memastikan setiap anak di Thailand memiliki rasa aman, nyaman, dan merasa sangat berarti terutama untuk korban fenomena sosial kekerasan seksual. Artinya, UNICEF disini menjadi pilar penting dalam memberantas masalah sexual assault yang terjadi di Thailand. Partisipasi UNICEF pertama di Thailand yaitu pada tahun 1998, yang dibawah oleh negara Sri Lanka, India, Bangladesh, Vietnam, dan Thailand (Najmah Zahiro, 2016). Kemudian UNICEF membangun misi yang permanen (*UNICEF Permanent Mission*) di Bangkok khusus untuk mengatur masalah anak-anak di Thailand. Dan di tahun 2000, UNICEF berhasil namun hanya sekedar mengembangkan operasionalnya ke berbagai wilayah Thailand. Terdapat tantangan yang dihadapi oleh UNICEF yaitu kasus kekerasan seksual ini telah berkembang bersamaan dengan dinamika sosial-politik, hingga permasalahan mengenai kekerasan seksual ini menjadi perhatian dari masyarakat regional dan internasional (Mubarq, 2016).

Selain itu respon UNICEF mengenai *sexual assault* di Thailand yaitu dengan menyelenggarakan beberapa program seperti *Child Protection, Education, HIV/AIDS, Social Policy and Advocacy, Emergencies*. Program *Child Protection* dilakukan untuk membantu anak-anak korban prostitusi yang rentan terhadap kekerasan. Jika tidak diberi perlindungan, anak-anak ini akan menghadapi risiko dari berbagai ancaman, termasuk luka parah dan kematian, perkembangan fisik dan mental yang buruk, serta HIV/ AIDS. Program *Child Protection* ini berfokus pada penguatan sistem perlindungan anak dan membangun kapasitas keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam mencegah, membantu, serta menangani masalah prostitusi anak di Thailand (UNICEF, 2018; *Violence Against Children*).

Selain itu, UNICEF juga turut mengembangkan Sistem Perlindungan Anak (CPMS) yang telah dipasang di 135 Kecamatan (Tambon) di Thailand Selatan, Tengah, dan Timur Laut. Sistem ini berisikan informasi setiap anak dan mengidentifikasi anak-anak yang

berisiko atau telah menjadi korban kekerasan, pelecehan, pengabaian dan eksploitasi seksual. Bahkan tercatat, sudah 150.000 anak telah tercatat di sistem. Selain itu, dikatakan bahwa UNICEF telah memberikan pelatihan kepada petugas kecamatan dan provinsi termasuk pekerja sosial tentang bagaimana mencegah kekerasan terhadap anak di masyarakat dan untuk merespons dengan tepat tentang kapan atau anak telah korban kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi.

***Sexual assault* di Thailand berdasarkan perspektif Human Security**

Berdasarkan perspektif *Human Security* yang dimana *Human Security* muncul karena maraknya permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan manusia seperti terorisme, perdagangan manusia, perdagangan senjata ilegal, konflik antar penduduk, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut juga menyadarkan manusia bahwa keamanan pribadi merupakan suatu hal yang melekat di dalam diri manusia dan merupakan hak pribadi.

Pada dasarnya *sexual assault* merupakan bentuk kejahatan yang dapat menimbulkan perasaan tidak aman terhadap korban, dimana dapat memberikan luka fisik maupun mental terhadap korban kekerasan seksual. Perspektif *Human Security* memberikan pandangan bahwa setiap masyarakat memiliki hak keamanan atas pribadi untuk melindungi pribadi tersebut dari maraknya permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan manusia termasuk *sexual assault* itu sendiri, dimana seseorang sebagai korban, tidak peduli gender yang dimiliki seseorang tersebut juga harus memiliki hak atas keamanan diri sendiri.

Banyaknya wisatawan seks dalam jumlah besar membuat *sex tourism* di Thailand semakin berkembang (ECPAT International, 2011: 9). Menurut lembaga riset yang berbasis di AS "*Protection Project*", perkiraan jumlah anak-anak korban prostitusi di Thailand berkisar 12.000 anak. Perkiraan pemerintah mengungkapkan bahwa lima persen dari anak-anak tersebut adalah laki-laki (www.ecpat.net). Di sisi lain dari perdebatan ini banyak LSM memperkirakan jumlah korban ESKA berada di ratusan ribu. Laporan lain memperkirakan jumlah anak korban prostitusi menjadi setidaknya 80.000 anak (www.unicri.it).

Adapun bentuk sekuritisasi yang dilakukan oleh Thailand yaitu melakukan ratifikasi terhadap tiga konvensi PBB yaitu, Konvensi ILO atau *Worst Form of Child Labour Convention* nomor 182 tentang pekerja anak, *Convention on the Rights of the Child (CRC)*, *Optional Protocol on Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography* untuk mengurangi jumlah eksploitasi seksual komersial anak. Salah satu bentuk implementasi dari

pemerintah Thailand karena telah meratifikasi Konvensi Hak Anak adalah dengan membuat Undang-undang mengenai anak yang dikenal dengan *Child Protection Act* pada tahun 2003. Undang-undang dalam pasal ini berlandaskan pada pasal-pasal yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak PBB. Selain itu untuk mengurangi jumlah prostitusi anak yang awalnya menjadi korban *trafficking*, pemerintah Thailand merumuskan kebijakan *Anti-Trafficking in Persons Act*. Kebijakan ini pada dasarnya merupakan perbaikan dari *Prevention and Suppression of Trafficking in Women and Child Act* tahun 1997 yang dianggap belum dapat mengkoordinir semua keselamatan manusia terhadap *human trafficking* terutama laki-laki (www.humantrafficking.org).

Thailand melakukan penyempurnaan terhadap undang-undang sebelumnya dan mengubahnya menjadi *The Anti-Trafficking in Persons Act* pada tahun 2008. Undang-undang tersebut fokus kepada kasus perdagangan manusia. Kebijakan nasional tersebut meliputi instrumen hukum nasional dan internasional yang mengatur tentang perdagangan manusia seperti protokol perdagangan manusia dari PBB. Pemerintah Thailand terus berusaha membuat kebijakan lanjutan untuk memperbaiki dan menguatkan undang-undang sebelumnya, seperti *The National Plan of Action (NPA) to Eliminate the Worst Forms of Child Labor (2009-2014)*, dan *The National Policy, Strategy, and Measures for the Prevention and Suppression of Trafficking in Persons (2011-2016)* (www.dol.gov).

Melalui perspektif *human security*, dengan adanya permasalahan kejahatan dan kekerasan seksual di Thailand tentu membuat masyarakat Thailand hingga wisatawan yang datang ke Thailand merasa terancam dan dalam bahaya. Masalah *Human Security* terhadap kekerasan seksual kepada anak-anak dan perempuan di Thailand sudah menarik berbagai entitas sosial yang sebagian besar diantaranya telah terbentuk sebuah hubungan emosional dan ikatan-ikatan ekonomi yang saling membutuhkan. Namun setelah melakukan berbagai upaya pengendalian *remote sexual assault* hingga respon dari UNICEF, permasalahan *human security* di Thailand ini masih belum terselesaikan, dan masih berjalan hingga saat ini.

KESIMPULAN

Thailand merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang menjadi negara tidak aman untuk *traveler* terutama wanita, banyaknya kejahatan seksual yang terjadi di Thailand membuat para wisatawan perlu menjaga diri dari kejahatan seksual. Terdapat istilah *sex tourism* di Thailand yang sudah muncul sejak masa pemerintahan Ayuthya (1350-1767) yang ditandai oleh dilegalkannya prostitusi di Thailand. Permasalahan *human security*

yaitu kekerasan seksual terhadap anak-anak di Thailand terus terjadi hingga saat ini, terdapat industri seks di Thailand sebagai penyumbang devisa negara terbesar, karena dalam sektor kebijakan pemerintah berfokus pada pengembangan ekonomi pariwisata. Maka dari itu permasalahan ini mendapatkan perhatian dari masyarakat regional, masyarakat internasional, hingga organisasi internasional yaitu UNICEF.

Kekerasan seksual terhadap anak-anak di Thailand ini rupanya mendapatkan respon dari UNICEF hingga membuat beberapa program pengendalian *remote sexual assault* di Thailand. Respon UNICEF mengenai *sexual assault* di Thailand yaitu dengan menyelenggarakan beberapa program seperti *Child Protection, Education, HIV/AIDS, Social Policy and Advocacy, Emergencies*. Tetapi setelah melakukan berbagai upaya pengendalian *remote sexual assault* hingga respon dari UNICEF, permasalahan *human security* di Thailand ini masih belum terselesaikan, dan masih berjalan hingga saat ini.

UNICEF sebagai Organisasi Internasional telah menjalankan fungsinya dengan baik, meskipun terdapat beberapa faktor serta tantangan yang menghambat tetapi itu semua dapat dijadikan sebagai pelajaran untuk program-program kedepannya supaya program yang dibuat nanti lebih inovatif dan efektif, dan juga implementasinya bisa lebih konkrit serta berdampak baik untuk seluruh anak-anak dan perempuan di Thailand hingga permasalahan *sexual assault* ini dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, I. (2016). Ketidakefektifan Program Pemerintah Thailand dalam Menjalankan Rekomendasi UNIAP. *JURNAL ANALISIS HUBUNGAN INTERNASIONAL, VOL. 5, NO. 2, 507-517*.
- Khidhir, S. (2019, August 29). *Thais have a sexual harassment problem*. Retrieved from theaseanpost.com: <https://theaseanpost.com/article/thais-have-sexual-harassment-problem>
- Misti, D. (2018). ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH THAILAND DALAM UPAYA MENANGANI KASUS TRAFFICKING IN PERSONS PADA TAHUN 2015-2017. *SKRIPSI Universitas Islam Indonesia, 1-69*.
- Mubarok, M. A. (2016, April 7). *UPAYA UNICEF (UNITED NATIONS OF INTERNATIONAL CHILDREN'S FUND) DALAM MENANGANI PROSTITUSI ANAK DI THAILAND TAHUN 2010-2013*. Retrieved from uinjkt.ac.id: <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/40524/2/MAS%20AL%20MUBAROQ.pdf>
- NATIONS, U. (2016). *HUMAN SECURITY HANDBOOK*. New York.
- Oryza, M. D. (2016). Peran UN Women dalam Upaya Thailand Mengatasi Permasalahan Perdagangan Perempuan. *JURNAL ANALISIS HUBUNGAN INTERNASIONAL, VOL. 5, NO. 2, 410-421*.
- Peggy, S. (2020, Maret 18). *Indonesia Darurat "Human Security", Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak*. Retrieved from Kompasiana:

- <https://www.kompasiana.com/sapphirapeggy/5e723894097f365d5339ddf2/indonesia-darurat-human-security-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak>
- UNHCR. (n.d.). *Support for those experiencing violence*. Retrieved from UNHCR The UN Refugee Agency: <https://help.unhcr.org/indonesia/services/sgbv/>
- Wattimena, A. N., Azizah, N., & Hertini, R. S. (2018). Kerjasama United Nations Children's Fund (UNICEF) dan Pemerintah Thailand dalam Menangani Kasus Prostitusi Anak di Thailand. *Journal of Islamic World and Politics*, Vol. 2, No. 2, 304-316.
- Widhi, M. N. (2018). PERAN PEMERINTAH THAILAND DALAM MENANGGULANGI EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK DI THAILAND. *Journal of International Relations*, Vol. 4, No. 4, 730-738.
- Yasmin, N. (2021). PERAN UNICEF (UNITED NATIONS INTERNATIONAL CHILDREN'S EMERGENCY FUND) DALAM UPAYA PENANGANAN KASUS TEENAGE PREGNANCY DI THAILAND TAHUN 2014-2017. *SKRIPSI Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta*, 1-186.